

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN 2019  
DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**A. Ray Rangga Yudhantara**

Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan  
Dalam Negeri  
Email : [rayyudhantara@gmail.com](mailto:rayyudhantara@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is a government development program implemented nationally to address and prevent the problem of uninhabitable housing where local governments collaborate with stakeholders in planning and implementation, as well as promoting community self-reliance. The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) was carried out in 2019. The purpose of this study was to determine the evaluation of the level of community self-help, the inhibiting factors and the efforts made to overcome these inhibiting factors. In this study, the author uses a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observations (observations) and documentation. Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that of the five indicators of effectiveness, efficiency, accuracy, and adequacy, they were quite good. While the responsiveness is still not good. The obstacles faced during the activity were the lack of facilities and infrastructure provided by the Kelurahan and also the limited budget allocation so that it required self-help from the community. Efforts have been made, among others, by implementing programs and activities to the fullest, providing facilities and infrastructure, focusing on the construction of ALADIN (roofs, walls, floors) and conducting socialization to the community regarding the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program.*

*Keywords : evaluation ; self-help housing stimulant assistance (BSPS).*

## **ABSTRAK**

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pembangunan pemerintah yang dilaksanakan secara nasional untuk mengatasi dan mencegah masalah rumah yang tidak layak huni dimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi, serta mengedepankan swadaya masyarakat. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah berlangsung pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengevaluasi tingkat swadaya masyarakat, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator efektivitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan sudah cukup baik. Sedangkan responsivitas masih belum baik. Adapun kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung adalah kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pihak Kelurahan dan juga terbatasnya alokasi anggaran sehingga membutuhkan swadaya dari masyarakat. Upaya – upaya yang dilakukan diantaranya dengan melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal, menyediakan sarana maupun prasarana, memfokuskan pembangunan ALADIN (atap,dinding,lantai) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kata kunci : evaluasi ; bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan utama dari suatu kebijakan pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan, ketidakberdayaan dan keterbelakangan. Kemiskinan kerap kali dijadikan acuan dalam keberhasilan suatu pembangunan di Indonesia. Pemerintah mendefinisikan bahwa kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat.

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Amanat UUD 1945 tersebut mendudukkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam berkehidupan yang layak serta jauh dari kemiskinan dan dapat meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupnya.

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar sampai sekarang, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tergolong tinggi dibandingkan dengan negara tetangga maupun di Asia. Berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di negara ini. Namun hal ini, sepertinya tidak kunjung berkesudahan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun. Masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang ada pada umumnya yang dihadapi hampir di semua negara–negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya, seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius. Kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat dan mampu membantu menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2020 dengan pulau Jawa mencatatkan jumlah penduduk miskin terbesar yang ada di Indonesia yang mencapai 14,05 juta orang. Pulau Sumatera mencapai 5,84 juta orang miskin. Dilanjutkan, dengan Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 2,03 juta orang miskin. Di urutan selanjutnya ada Pulau Sulawesi mencatat ada 2,01 juta orang miskin. Maluku dan Papua mencapai 1,52 juta orang miskin. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang terendah berada di Pulau Kalimantan dengan penduduk miskin sebesar 969,64 ribu orang.

Edi Suharto (2009:16) mengungkapkan bahwa “Kemiskinan menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya”. Dimana sudah sesuai dengan tujuan sebuah negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4.

Selama beberapa dekade, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan prasarana dan pendampingan , penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semua berorientasi material, sehingga berkelanjutannya sangat bergantung pada ketersediaan

anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintah yang demokratis menyebabkan rendahnya aksestabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 652.941 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, merilis persentase data penduduk miskin di 24 Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, tentu masih memiliki penduduk yang dikatakan masuk dalam kategori miskin. Persentase penduduk miskin di 24 Kabupaten/Kota yang disampaikan dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa, Kabupaten Gowa berada di posisi kedelapan yang memiliki penduduk miskin, yakni 7,53 persen.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang diambil berdasarkan bagaimana pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang diketahui, bahwa dana yang diberikan dalam program ini sangatlah kurang untuk pembangunan sebuah rumah jadi harus menggunakan swadaya dari masyarakat setempat.

Kurangnya sarana maupun prasarana menjadi hambatan dan juga terbatasnya alokasi anggaran menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program BSPS ini sehingga harus cepat diantisipasi agar tidak sampai menghambat terlaksananya program BSPS ini.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan penelitian ini juga penulis terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks program bantuan khususnya di bidang perumahan. Penelitian Priadi, Ashifa Rizki Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Priadi, Ashifa Rizki 2018), menemukan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyediaan perumahan yang layak huni. Dimana teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 aspek yaitu : standard an sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini sangat berpengaruh terhadap program yang penulis akan teliti dimana, sangat membantu masyarakat dalam proses pengembangan rumah yang layak huni dengan bantuan swadaya dari masyarakat setempat.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dimana dalam konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan menggunakan teori dari William N Dunn dengan melihat dari beberapa indikator yaitu, efektivitas, efesiensi, kecukupan, ketepatan dan responsivitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 1) Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 2) Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

## II. METODOLOGI

Dalam kegiatan magang riset terapan pemerintahan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu, berusaha mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lokasi penelitian berlangsung, lalu ditelaah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun dalam pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini. Adapun informan peneliti dalam wawancara dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Informan Wawancara**

<b>NO</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1
2.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan	1
3.	Lurah di Kecamatan Somba Opu	7
4.	Tokoh Pemuda di Kecamatan Somba Opu	7
5.	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Somba Opu	7
6.	Masyarakat Penerima Bantuan BSPS	7
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>

Sumber : Analisis Penulis 2020

Data – data yang diperoleh dari informan kemudian dipilih dan disederhanakan dalam bentuk teks atau uraian singkat maupun bagan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu**

Berdasarkan hasil rembuk/musyawarah warga telah dirumuskan bahwa visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah “*Terwujudnya lingkungan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan pengelolaan pertanahan yang berkualitas*“. Upaya penanganan permasalahan perumahan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 di Kecamatan Somba Opu khususnya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu, Katangka, Kalegowa, Tamarunang, Paccinongang, Batangkaluku, Tombolo, Tompobalang. Jadi, pihak Kelurahan akan mengumpulkan data-data warga yang rumahnya tidak layak huni. Kemudian, pihak Kelurahan akan menyampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah itu, PPK akan menyampaikan data warga Kelurahan ke Koordinator Fasilitator (KORFAS). Setelah itu, korfas bersama fasilitator akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung data-data rumah yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Setelah itu korfas dan fasilitator akan menyampaikan hasil tinjauan lapangan ke PPK kemudian, menyeleksi beberapa rumah yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Hasil dari seleksi perumahan antara PPK, KORFAS dan Fasilitator yaitu, Kelurahan Paccinongang 9 (Sembilan) rumah, Kelurahan Katangka, Tombolo, Tamarunang, Tompobalang, Kalegowa dan Batangkaluku masing-masing mendapatkan 11 (Sebelas) rumah. Kemudian, setelah ditetapkan PPK akan menyampaikan hasilnya ke Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan selanjutnya dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menyampaikan ke pihak Kelurahan dimana Lurah akan meneruskan ke warga-warga yang lolos verifikasi rumah.

Warga dari tiap Kelurahan yang lolos verifikasi kemudian akan, menerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000,- di rekening masing-masing. Setelah warga menerima bantuan mereka akan mulai proses pengerjaan rumah.



Adapun bagian-bagian yang difokuskan untuk pengerjaan rumah yaitu, ALADIN (Atap,lantai,dinding). Dimana, warga penerima bantuan harus memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk membangun rumahnya agar kelihatan layak untuk ditinggali.

Adapun dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilihat dari beberapa aspek :

### **1. Efektivitas Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Program BSPS**

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan sebuah perubahan secara signifikan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu merupakan salah satu program dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diman bertujuan meningkatkan kualitas layak huni bagi masyarakat. Berdasarkan data hasil pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ada di halaman sebelumnya, setiap rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan bangunan rumah mengalami peningkatan ketahanan rumah.

### **2. Efisiensi Peran Lembaga, Tim dan Mekanisme Pelaksanaan Program BSPS**

Efisiensi disini adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan suatu tingkat efektivitas tertentu. Untuk analisis efisiensi peran lembaga terkait dan mekanisme pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu :

1. Kepanitiaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mekanisme pengajuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan tugas.

Berdasarkan Surat Edaran PUPR No. 02/PRT/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur. Tujuan dari pemberian bantuan pemerintah ini adalah untuk mendukung pelaksanaan penanganan perumahan serta

meningkatkan sosial ekonomi wilayah melalui penyediaan atau peningkatan infrastruktur.

### **3. Tingkat Kecukupan Capaian Program**

Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal contohnya rumah. Rumah yang tadinya terasa sangat tidak layak dan mendapatkan bantuan untuk diperbaiki atau dibangun ulang hasilnya akan terlihat lebih bagus dan itu sudah mencapai kata cukup. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Untuk analisis tingkat kecukupan capaian program dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

### **4. Ketepatan Kelompok Sasaran Pelaksanaan Program BSPS**

Kriteria ketepatan berguna untuk mengukur apakah tujuan dari program telah tepat sasaran kepada masyarakat atau belum. Untuk analisis ketepatan kelompok sasaran kepada masyarakat atau belum. Untuk analisis ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program BSPS dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan program BSPS. Analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah program ini telah sesuai dengan kriteria sasaran penerima bantuan BSPS yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan BSPS di Kecamatan Somba Opu didominasi oleh tingkat penghasilan warga dibawah Rp. 1.200.000,- – Rp. 1.600.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa kecilnya penyimpangan kelompok sasaran penerima bantuan BSPS, karena sebagian besar penerima bantuan ialah masyarakat berpenghasilan rendah.

### **5. Responsivitas Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program BSPS**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). Suatu keberhasilan

kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi.

Kriteria responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan atau nilai dari kelompok tertentu. Adapun dalam hal ini dilihat dari :

1. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesesuaian Harapan masyarakat Atas Pelaksanaan Program

Analisis persepsi masyarakat mengenai kesesuaian harapan masyarakat atas pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan harapan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantaun BSPS di Kecamatan Somba Opu terbagi dalam dua suara yaitu, ada masyarakat yang merasa program telah sesuai dengan harapan mereka dan ada masyarakat yang merasa pelaksanaan program belum sesuai dengan keinginan mereka. Alasan utama pelaksanaan program BPS ini belum sesuai dengan harapan mereka adalah karena, bantuan BPS yang diberikan tidak cukup besar untuk tempat tinggal mereka yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 orang.

2. Persepsi Masyarakat Mengenai Manfaat Yang Dirasakan Masyarakat

Menurut masyarakat tentang manfaat program BPS yang dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu berdasarkan hasil wawancara manfaat yang paling dirasakan oleh seluruh masyarakat dari program bantuan yang kami terima ini adalah memiliki tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya.

3. Persepsi Masyarakat Mengenai Permasalahan Yang Dihadapi

Menurut masyarakat berdasarkan hasil wawancara tidak banyak permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS). Hanya ada dua yaitu, rumitnya masalah pengajuan bantuan BPS, hal ini terjadi akibat dari tingginya tingkat usulan dari masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BPS dan yang kedua masalah teknis terkait material pembangunan. Namun

hal ini, menurut mereka bisa diatasi baik secara bersama-sama dengan pihak yang ditugaskan untuk membangun rumah yang layak huni.

### **3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

#### **a. Sarana dan Prasarana Terbatas**

Faktor sarana dan prasarana yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Somba Opu. Hal ini dikarenakan, mengalami hambatan dalam proses pelaksanaan yang diakibatkan ketika cuaca yang kurang bersahabat datang karena, proses pengerjaannya dilaksanakan pada saat musim penghujan. Program BSPS dilaksanakan pada awal Februari sampai akhir februari 2019. Penundaan pekerjaan akibat cuaca yang tidak mendukung berdampak pada penambahan waktu kerja sehingga ada titik yang dalam pengerjaannya tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya dikarenakan, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selain itu akibat dari kurangnya sarana maupun prasarana yang tidak mendukung selama proses pembangunan menyebabkan adanya penambahan swadaya masyarakat untuk menyelesaikan proses pembangunan hingga tepat selesai pada waktunya.

#### **b. Terbatasnya Alokasi Anggaran**

Terbatasnya alokasi anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pentingnya pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu. Hal ini terjadi karena, dana yang dibagikan hanya sebesar Rp.17.500.000 dengan rincian Rp.15.000.000 biaya bangunan dan Rp.2.500.000 biaya tukang hal ini menyebabkan sangat kurang dan membuat proses pembangunan akan berjalan semakin lama sehingga, membuat mereka harus menambah swadaya masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tepat pada waktunya.

### **3.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

- a. Untuk mengatasi hambatan yang diakibatkan oleh kurangnya sarana maupun prasarana, pemerintah mungkin tidak bisa berbuat banyak karena, kondisi alam dan lingkungan yang tidak bisa ditebak. Namun pemerintah dan tim pelaksana melakukan upaya semaksimal mungkin agar dapat mencapai hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Tim pelaksana program BSPS berupaya untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana dengan semaksimal mungkin meskipun faktor cuaca yang tidak mendukung yang mau tidak mau membuat pekerja harus mengulang pekerjaannya demi hasil yang maksimal. Hal tersebut dilakukan agar hasil pembangunannya dapat bertahan lama dengan harapan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat penerima bantuan dalam jangka waktu yang lama pula.
- b. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai optimalisasi anggaran dalam program BSPS yaitu, dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat baik yang memiliki SDM yang tinggi maupun SDM yang rendah dalam program BSPS ini dan apa yang menjadi tujuan serta mafaat dari program BSPS yang ditujukan untuk masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memfokuskan pembangunan pada bagian ALADIN (atap,lantai,dinding) untuk meminimalisir anggaran yang di dapat itupun kalau ada masyarakat yang memiliki SDM yang lebih tinggi dapat memberikan bantuan terhadap yang menerima agar dana yang didapat bisa digunakan untuk membangun bagian yang kurang oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman kepada individu agar semua masyarakat dapat ikut memberikan swadayanya dalam pelaksanaan program BSPS. Selain itu, masyarakat juga diberikan motivasi mengenai kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan ini. Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan swadaya masyarakat adalah untuk membangun integritas antara pemerintah Kecamatan Somba Opu, pelaksana program BSPS dan juga masyarakat. Tujuan dengan dibangunnya integritas ini adalah untuk menselaraskan kondisi

masyarakat sebagai objek pelaksana dengan rencana kegiatan program BSPS serta kebijakan dari pemerintah Kecamatan mengenai pelaksanaan program BSPS. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaan program pemerintah ini dapat diketahui oleh seluruh pihak baik itu pemerintah ini dapat diketahui oleh seluruh pihak baik itu pemerintah, pelaksana, maupun masyarakat sehingga, apa yang menjadi tujuan dari program BSPS benar-benar tercapai.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang penulis bandingkan dengan penelitian sebelumnya dimana hasil penelitian penulis sangat terarah dimana penelitian penulis dalam mengevaluasi pelaksanaan program BSPS sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Penelitian ini memiliki dampak yang sangat bagus kedepannya karena, akan memberikan gambaran dalam pelaksanaan program BSPS yang akan datang.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan dan telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Evaluasi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan lima indikator yang digunakan dalam teori William.N.Dunn yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan dan responsivitas sudah berjalan dengan baik. Dimana dalam pelaksanaannya telah terbangun rumah yang sudah layak huni bagi masyarakat miskin dan proses pembangunannya bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan rumah yang dibangun juga tepat mutu dan kualitasnya sangat baik hingga dapat memuaskan masyarakat yang menerima bantuan BSPS.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain kurangnya sarana maupun prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program BPS dan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang

mendukung terutama pada saat kegiatan proses pembangunan berlangsung di pertengahan Februari. Anggaran yang dibutuhkan sangat terbatas sehingga pelaksanaannya membutuhkan swadaya dari masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperbaiki kekurangan yang ada pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik dari segi sarana dan prasarana serta terus melakukan sosialisasi dan juga mengoptimalkan setiap anggaran yang akan digunakan.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan cuaca dalam penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di masa pandemi *Covid-19* dengan cuaca yang kurang baik sehingga proses pengambilan data dan informasi sedikit agak terhambat.

#### **Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)**

Penelitian ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi lahirnya penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada studi pembangunan dan pemberdayaan.

### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya, semua Purna Praja Kabupaten Gowa dan seluruh perangkat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Kabupaten Gowa atas bantuannya dalam penyusunan laporan akhir ini.

### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-Buku**

Agustino Leo .2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.

- Ahmad,F.Umar. 2011. *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharmisi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Hasan, Erliana. 2011. *Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Mulyadi.
- Nazir, Moh. 2009, *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Panudju, Bambang. 2008. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Alumni.
- Satori. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Unniversity Press.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instumen Evaluasi* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulber, Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama.



Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Undang-Undang**

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Surat Keputusan Bupati Gowa No 175/II/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

## **C. Internet**

<http://gowakab.bps.go.id/sombaopudalamangka2014-2018> diakses tanggal 27 September 2020 pukul 16.45

<http://gowakab.bps.go.id/sombaopudalamangka2019> diakses tanggal 1 Oktober 2020 pukul 16.48

<http://perkimtankab.gowa2020> diakses tanggal 1 Oktober 2020 pukul 13.00

<http://keluargaharapan.com> diakses tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.15